

Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi D.I. Yogyakarta

¹Yumna Huwaida, ²Astri Fatimah, ³Sabrina Muharani, ⁴Aisya Iraswati, ⁵Deris Desmawan

¹Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553210106@untirta.ac.id

¹Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553220003@untirta.ac.id

¹Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553220012@untirta.ac.id

¹Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553220013@untirta.ac.id

¹Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, derisdesmawan@untirta.ac.id

Abstract

One indicator of a nation or region's progress and development is economic growth. A province's economic growth is a type of rising macroeconomic indicators. This study's goal is to examine the impact of poverty on economic development in DI Yogyakarta. The author employs online browsing, documentation studies, and library research tools to gather secondary data from relevant organizations, particularly the Central Bureau of Statistics (BPS) DI Yogyakarta. The study's findings indicate that poverty and unemployment do not significantly interact. It is uncertain if a decline in the unemployment rate would result in a reduction in poverty in the DI Yogyakarta Province.

Keywords : Poverty, Gross Regional Domestic Product (PDRB).

Pendahuluan

Ketidakmampuan beberapa individu untuk hidup sesuai dengan standar yang dipandang manusiawi inilah yang menyebabkan kemiskinan. Kondisi ini menurunkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang mempengaruhi rendahnya produktivitas dan pendapatan. Salah satu masalah utama dalam ekonomi berkembang adalah masalah kemiskinan. Secara umum, pembangunan ekonomi berusaha untuk meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan manusia di semua sektor pembangunan, memastikan bahwa sumber daya didistribusikan seefisien mungkin, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan tingkat kehidupan individu. Untuk mencapai tujuan pembangunan Secara umum, diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan penghasilan.

Pemerintah Indonesia menyadari betapa pentingnya pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Akibatnya, berbagai program pembangunan banyak terfokus pada pembangunan daerah, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Dengan menggabungkan

pembangunan jangka pendek dan jangka panjang telah diketahui akar pembangunan nasional, dan pembangunan daerah kini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing daerah. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah laju penurunan penduduk miskin. Efektivitas kapasitas strategi untuk menurunkan populasi masyarakat miskin merupakan pertimbangan penting.

Masalah mendasar tersebut masih belum terselesaikan meskipun pemerintah pusat dan daerah sudah berupaya untuk menetapkan berbagai kebijakan dan inisiatif pengendalian kemiskinan. Hasil terbaik sedang dihasilkan oleh kebijakan dan inisiatif. Masih terdapat kesenjangan antara rencana dan pencapaian target karena meningkatnya fokus sektoral dari kebijakan dan inisiatif penanggulangan kemiskinan. Kekhawatiran ekonomi, sumber daya manusia, fisik/infrastruktur, sosial, dan keluarga/rumah tangga adalah semua kemungkinan manifestasi dari kemiskinan. Perlu digarisbawahi bahwa orang miskin membutuhkan lebih dari sekedar bantuan keuangan atau materi; mereka juga membutuhkan lingkungan yang mendorong pengembangan jaringan sosial dan ekonomi yang saling bergantung. Organisasi yang paling efektif untuk menciptakan suasana seperti itu seringkali adalah pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Sumedi dan Supadi, 2004).

Menurut BPS Provinsi DI Yogyakarta (2013), masalah kemiskinan masih menjadi persoalan. Terdapat disparitas kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan kemiskinan karena masyarakat miskin memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang sedikit dan kualitas tenaga yang rendah. Kualitas rendah memerlukan produktivitas yang cukup rendah untuk berdampak pada gaji dan adanya kesenjangan dalam akses ke modal. Indonesia telah membuat langkah besar dalam mengentaskan kemiskinan selama sepuluh tahun terakhir, tetapi pemerintah negara semakin mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi adalah cara yang tidak memadai untuk memenuhi tujuan masyarakat yang adil dan makmur (Widyasoro, 2014). Untuk mencapai tujuan tersebut, dikembangkan bermacam kegiatan yang difokuskan pada pembangunan daerah, khususnya di negara-negara yang tertinggal. Oleh karena itu, salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan nasional adalah seberapa cepat penurunan angka kemiskinan.

Dengan terbukanya perdagangan bebas yang memungkinkan pasokan tenaga kerja asing yang D.I. Yogyakarta kini semakin mumpuni untuk masuk ke dalam negeri, merupakan salah satu alasan utama mengapa pasar tenaga kerja semakin dinamis di era globalisasi ini. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk memainkan dua peran: satu di sisi penawaran dan satu di sisi permintaan. Penduduk berfungsi sebagai pelanggan dalam hal penawaran dan produsen dalam hal permintaan. Itulah sebabnya, jika suatu populasi memiliki kapasitas produksi dan penyerapan output yang tinggi, ekspansi populasi yang cepat tidak selalu menjadi penghalang keberhasilan ekonomi. Ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat seiring dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Menurut penelitian (Ridzky, 2018), pengangguran berdampak pada kemiskinan juga karena pengangguran yang tinggi berdampak pada tingkat pertumbuhan yang lambat, yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan Produk Domestik Bruto (jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi) (PDB). PDB, atau produk domestik bruto, adalah jumlah dari semua kegiatan ekonomi yang dilakukan di suatu negara baik oleh penduduk maupun orang luar yang tinggal di sana. Oleh karena

itu, indikator luas yang sering digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB skala nasional maupun persentase perubahan PDRB provinsi atau kabupaten/kota.

Landasan Teori

Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat menggunakan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan memajukan kehidupan yang layak. Berdasarkan prinsip kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, yang juga digunakan oleh beberapa negara lain, definisi kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan material esensial seseorang, termasuk untuk makanan dan barang-barang non-makanan (sebagaimana ditentukan oleh pengeluaran sampingan).

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi semua negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan karena kemiskinan bersifat multidimensional, artinya memiliki unsur utama dan unsur sekunder karena kebutuhan manusia berbeda-beda. Aspek utama kemiskinan adalah aset yang buruk, sistem sosial politik yang tidak terorganisir, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta jaringan sosial dan sumber daya keuangan yang tidak memadai. Menurut temuan survei, mereka yang miskin memiliki anggaran bulanan di bawah tingkat kemiskinan rata-rata (Sampel). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Sumber statistik makro, atau angka kemiskinan yang dilaporkan oleh BPS, menunjukkan proporsi penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk suatu wilayah.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari pergeseran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di suatu wilayah yaitu salah satu indeks tolak ukur makro keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Nilai tambah total yang diciptakan oleh semua unit usaha di suatu daerah, atau nilai total produk dan jasa jadi yang dihasilkan karena semua komponen ekonomi di suatu wilayah, dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kegiatan ekonomi suatu wilayah pada umumnya akan semakin besar dengan semakin tinggi laju pertumbuhannya. Sejumlah besar tenaga kerja dapat terserap sebagai akibat produksi berbagai barang dan jasa meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi. sehingga baik pengangguran maupun kemiskinan menurun.

Ukuran ekonomi makro yang disebut produk domestik regional bruto (PDRB) dapat memberikan gambaran umum tentang seberapa baik kinerja ekonomi suatu daerah. Ada tiga metode yang digunakan untuk menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu daerah, yaitu:

1. Menurut metode produksinya, PDRB merupakan total biaya barang jadi atau jasa yang disediakan selama periode waktu tertentu oleh beberapa fasilitas industri yang terletak di area tertentu.
2. Imbalan yang dimanfaatkan oleh unsur-unsur produksi yang ikut serta dalam proses produksi di lokasi tertentu pada waktu tertentu disebut PDRB menurut metode pendapatan.
3. Menurut model pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup semua elemen pengeluaran akhir, termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pengeluaran pemerintah, penciptaan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto dalam suatu kerangka

waktu tertentu.

Metode Penelitian

Misi dari observasi ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan perekonomian dan tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pengamatan non-partisipan, dimana peneliti tidak berpartisipasi dan semata-mata bertindak sebagai pengamat independen, merupakan metode yang digunakan mengumpulkan data bagi penelitian ini (Gujarati, 2004). Teknik pengumpulan data ini meliputi pengumpulan observasi, penulisan dan analisis deskripsi buku, jurnal, dan tesis, serta memperoleh informasi dari perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. Data panel atau disebut juga pooled informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan campuran data time series dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Hasil Dan Pembahasan

Dibawah ini merupakan tabel presentase 5 tahun terakhir provinsi DI Yogyakarta berdasarkan tangka kemiskinan yang merupakan variable bebas serta PDRB sebagai variable terikat.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan di Di Yogyakarta 2018-2022

Presentase Tingkat Kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta	
Tahun	Kemiskinan
2022	11,34
2021	12,80
2020	12,28
2019	11,70
2018	12,13

Sumber : BPS, 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan provinsi DI Yogyakarta berada pada angka yang tidak stabil. Dapat dilihat pada tahun 2022 mencapai 11,34 dimana dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar -1,46% yaitu pada 2021. Sedangkan pada tahun 2020 berada di angka 12,28 dimana berarti mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya sebesar 0,58% yaitu sekitar 11,70. Pada tahun 2018, provinsi DI Yogyakarta mencapai 11,70 dengan penurunan sebesar -0.43% dari tahun 2018 yaitu sekitar 12,13.

Analisis Regresi

Dengan bantuan SPSS, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi di wilayah DI Yogyakarta.

Descriptive Statistics

Tabel 2. Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tahun	2007.50	8.803	30
PDRB	8.5100	18.23275	30
Kemiskinan	17.2043	4.90444	30

Tabel 3. Correlations

		TAHUN	PDRB	KEMISKIN AN
TAHUN	Pearson Correlation	1	-.195	-.373*
	Sig. (2-tailed)		.302	.042
	N	30	30	30
PDRB	Pearson Correlation	1	-.195	.290
	Sig. (2-tailed)		.302	.120
	N	30	30	30
KEMISKIN AN	Pearson Correlation	-.373*	.290	1
	Sig. (2-tailed)	.042	.120	
	N	30	30	30

Angka Korelasi (Pearson Correlation) pada PDRB sebesar $-0,195$ sedangkan kemiskinan sebesar $-0,373$ ini menunjukkan arah korelasi positif. Yaitu tingkat yang lebih maju inflasi lalu FDI tumbuh lebih sering, begitupula sebaliknya. Kuantitas korelasi $0,138 < 0,5$ bermakna tingkat inflasi berkaitan lemah dengan FDI nya. Signifikansi Hasil Korelasi (Sig.(2-tailed)) alasan pengambilan keputusannya ialah dengan dasar probabilitas yaitu Pada PDRB sebesar $0,302 > 0,05$ maka H_0 diterima, maka kedua variabel secara nyata tidak berkaitan. Sedangkan, pada kemiskinan diperoleh angka probabilitasnya yaitu $0,120$ dimana $> 0,05$ maka kedua variabel secara nyata tidak berkorelasi. Jumlah data yang berkaitan, akan terlihat dari nilai N, dikarenakan datanya tidak ada yang hilang maka dari itu data yang diproses adalah 30 yakni dari tahun 1993-2022.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh perekonomian. Berdasarkan temuan analisis penelitian tentang ekonomi memiliki dampak besar pada seberapa miskin suatu daerah di DI Yogyakarta. Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh negatif namun tidak dari variabel pertumbuhan ekonomi ke variabel kemiskinan terdapat hubungan yang signifikan secara statistik. Tanda positif dari koefisien menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berdampak pada tingkat kemiskinan.

Saran

1. Agar unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dikelola dengan baik, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah harus berupaya menciptakan lapangan kerja guna menampung dan meminimalisir angka pengangguran.
3. Warga negara harus diperkuat oleh ekspansi UMKM.
4. Penduduk memerlukan instruksi eksklusif untuk mengembangkan keterampilan mereka lalu mereka dapat bersaing di dunia kerja.

Daftar Pustaka

- Anggrayani, P. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1980-2012*, 16.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima*. STIM YKPN, Yogyakarta Badan Pusat Statistik, 2010. Dalam Angka 2009-2017 : BPS kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013. *Produk Domestik Regional Bruto :BPS Provinsi DI Yogyakarta*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014. *Produk Domestik Regional Bruto :BPS Kabupaten-Kota Provinsi D.I.YOGYAKARTA*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015. Dalam Angka 2008-2016 : BPS kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta, 2017.
- Prishardoyo, B. (2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. *Jejak*, 1(1).
- Sayifullah. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jurnal Ekonomi-QU. *JEQu : Jurnal Untirta*, 11(1), 21-36.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi 7. Jakarta: Erlangga.